

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam pembangunan Indonesia karena mengingat negara Indonesia sebagai negara agraris. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting. Indonesia memiliki luas lahan dan kondisi iklim yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian.

Pembangunan pertanian adalah usaha yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan mengoptimalkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini juga pembangunan pertanian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masyarakat baik secara keseluruhan dalam hal pemecahan masalah yang ada pada bidang pertanian. Dalam rangka merealisasikan pembangunan pertanian berkelanjutan dan mandiri, untuk menghadapi besarnya tantangan dalam pemanfaatan potensi sumber daya pangan, maka diperlukan sebuah arah kebijakan pembangunan pertanian.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada (Amelia, 2015).

Adapun dalam pembangunan pertanian tidak akan lepas dari peran serta pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya pembangunan pertanian dilakukan melalui berbagai instrumen maupun peraturan yang bisa disebut sebagai kebijakan pertanian. Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Salah satu contoh kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dari sektor pertanian adalah dengan mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang dikemas dalam bentuk kartu tani.

Pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijual terbuka dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan seperti harga dan tidak tepat sasaran. Penyimpangan tersebut dapat memberikan dampak negatif yang dapat merugikan semua pihak terutama bagi petani. Untuk meminimalisir pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijual terbuka maka pemerintah menerbitkan kartu tani. Pendistribusian pupuk bersubsidi dengan kartu tani menggunakan enam prinsip utama atau disebut 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat tempat. Kartu tani tidak hanya bermanfaat untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dan menjamin stok pupuk bagi petani, namun juga untuk membantu alokasi bantuan sarana produksi padi (Saprodi) dan sarana produksi pertanian (Saprotan) agar sesuai dengan sasaran terhadap petani dalam kategori miskin (Kurniawati, 2018). Oleh karena itu, bagaimana respons petani sangatlah penting karena petani bisa mendapatkan haknya sesuai dengan tujuan dibuatnya kartu tani.

Respons terhadap sebuah program merupakan refleksi dari persepsi, evaluasi, dan pandangan petani terhadap program tersebut. Respons ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana petani mengukur manfaat, pelaksanaan, dan dampak program kartu tani terhadap aktivitas pertanian yang dilakukan petani. Respons positif mencerminkan tingkat kepuasan petani terhadap program dan keyakinan bahwa program tersebut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pertanian. Sebaliknya, respon negatif mencerminkan ketidakpuasan petani atau permasalahan dalam implementasi program yang dapat menghambat efektifitasnya (Permataningrum, 2022).

Evaluasi respons petani memungkinkan untuk memahami sejauh mana program memenuhi harapan dan kebutuhan petani, serta memberikan pandangan dalam merancang perbaikan program. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang respons petani terhadap program kartu tani memberikan wawasan penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Program Kartu Tani akan dapat terlaksana dengan baik apabila program tersebut dapat mencapai dan diterima oleh sasaran program, serta dapat dikatakan

efektif apabila sasaran atau tujuan suatu program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan tujuan dari program kartu tani ini, salah satunya didukung oleh perilaku petani dalam menggunakan kartu tani. Petani diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menggunakan kartu tani yang diwujudkan melalui perilaku petani. Respons dan perilaku petani dalam menggunakan kartu tani menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program. Perilaku petani terhadap kartu tani dapat mempengaruhi keberlanjutan dari program kartu tani. Diduga semakin tinggi perilaku petani terhadap kartu tani maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program kartu tani (Permataningrum, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Respons Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar menjadi gambaran mengenai kebijakan kartu tani dilihat dari sudut pandang petani yang menjadi tujuan pemberlakuan kartu tani.

B. Rumusan Masalah

Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta). Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan kartu tani merupakan upaya transparansi dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani. Selain itu, uji coba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani di kios pengecer resmi bermanfaat untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Mekanisme kerja kartu tani diawali dengan aktivisasi kartu oleh bank penyalur, dimana di dalam kartu tani sudah diinput jumlah kuota pupuk bersubsidi (Urea, NPK, SP-36, Organik) yang berhak diterima oleh masing-masing petani. Kuota jumlah pupuk tersebut

didasarkan pada luas lahan yang ada di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Kartu tani juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat diisi uang deposit, sehingga pada saat petani membeli pupuk di kios, mereka tinggal menggesek kartu tersebut di mesin Electronic Data Capture (EDC). Pada saat transaksi akan terlihat jumlah jatah pupuk subsidi yang diambil petani, dan selanjutnya petani membayar sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Adanya terobosan ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan pertanian yang ada di Indonesia. Alasan dibalik terbentuknya kebijakan tersebut adalah sering terjadinya kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh oknum-oknum penjual pupuk. Sebelum adanya kartu tani pemesanan pupuk hanya menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai salah satu persyaratan untuk membeli pupuk, sebelum program kartu tani, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) belum memuat luasan tanah setiap petani, sehingga pengecer dan oknum pedagang yang memiliki uang lebih dapat membeli dengan leluasa tanpa pengawasan yang ketat. Pupuk menjadi menumpuk dipengecer yang kemudian dijual kembali kepada orang yang memiliki uang lebih dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Permasalahan tersebut yang menyebabkan kelangkaan pupuk di kalangan petani.

Kecamatan Kuranji adalah salah satu kecamatan di Kota Padang penerima kartu tani terbanyak yaitu sebanyak 2.750 petani yang tergabung kedalam beberapa kelompok tani. Pada umumnya penduduk Kecamatan Kuranji bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian. Berdasarkan data dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2022, kelompok tani yang menerima manfaat dari kebijakan pupuk bersubsidi melalui program kartu tani pada umumnya hanya mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska. Berdasarkan data dari surat keputusan Wali Kota Padang No. 439 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi untuk sektor pertanian per kecamatan tahun anggaran 2022, Kecamatan Kuranji mendapatkan alokasi pupuk terbanyak pada Tahun 2022 yaitu untuk jenis pupuk Urea 473,03 ton dari 1.675 ton di Kota Padang, dan untuk jenis pupuk NPK Phonska sebanyak 315,99 ton dari 1.150 ton di Kota Padang.

Kelurahan Kuranji adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kuranji penerima kartu tani terbanyak yaitu sebanyak 557 petani yang tergabung kedalam beberapa kelompok tani. Meskipun sudah beberapa tahun semenjak diberlakukan, namun petani di Kelurahan Kuranji masih belum menggunakan kartu tani dalam penyaluran atau penebusan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi. Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari dua kios resmi di Kelurahan Kuranji yaitu Gapoktan Inbis Sejahtera dan UD Anugrah, kedua kios tersebut masih belum menggunakan mesin electronic data capture (EDC) dalam penebusan pupuk bersubsidi. Oyon Safei sebagai pemilik Gapoktan Inbis Sejahtera mengungkapkan mesin EDC sudah diterima dari Bank Mandiri namun dalam penerapannya masih belum dipergunakan. Berdasarkan keterangan Randa pemilik kios UD. Anugrah, penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani berkemungkinan akan mulai diberlakukan pada tahun 2023 karena mesin EDC sudah tersedia di semua kios kios pengecer resmi di Kecamatan Kuranji.

Kondisi yang terjadi pada pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Kuranji yaitu petani hanya belum menggunakan secara optimal. Penggunaan kartu tani saat ini hanya untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi saja. Pemanfaatan kartu seperti layanan perbankan yaitu transaksi tarik tunai, transfer, pembayaran, pembelian pinjaman, pembiayaan KUR, dan kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara).

Masalah yang dihadapi petani selanjutnya adalah ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, terutama di setiap awal musim tanam, petani memilih menunggu pupuk bersubsidi karena tidak mampu membeli pupuk non-subsidi karena lebih mahal. Di Jawa Tengah masih ada kartu tani yang tidak berfungsi karena keengganan masyarakat untuk menabung di Bank BRI (Ashari & Hariani, 2018), kemudian di Jawa Timur masih ada beberapa petani mengaku belum merasakan manfaat yang didapatkan dari kartu tani yang diperolehnya (Mufidah & Prabawati, 2018) dan di Sumatera Utara pelayanan kartu tani yang diberikan belum optimal (Sihite, 2021).

Salah satu permasalahannya adalah distribusi pupuk bersubsidi yang dijual terbuka, yang menyebabkan banyak penyimpangan. Oleh karena itu, sistem harus

diubah agar distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kartu tani yang telah dibagikan kepada petani di Kota Padang untuk penebusan dan pembayaran. Di samping itu juga dapat mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas "enam tepat" (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga), serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Dengan begitu, distribusi pupuk bersubsidi dapat benar-benar diterima petani yang berhak. Setiap petani hanya akan menerima jatah alokasi sesuai dengan yang tercantum dalam sistem. Dengan demikian, distribusi pupuk bersubsidi dapat sepenuhnya diterima oleh petani yang memenuhi syarat. Setiap petani akan menerima alokasi sesuai dengan yang tercatat dalam sistem. Hal ini akan mengurangi penyimpangan pupuk bersubsidi yang biasanya terjadi di beberapa wilayah, sehingga kebutuhan pupuk bagi petani yang memenuhi syarat akan lebih terjamin. Akibatnya, pencapaian target produksi yang telah ditetapkan dapat terwujud, dan kesejahteraan petani akan semakin meningkat.

Dikarenakan pemanfaatan yang belum optimal pada saat ini, kartu tani hanya digunakan sebagai syarat wajib oleh petugas kios pupuk untuk memfasilitasi pembelian pupuk subsidi. Padahal, kartu tani seharusnya digunakan sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya, yakni sebagai alat transaksi yang memanfaatkan mesin Electronic Data Capture (EDC). Melalui EDC, transaksi pembelian pupuk subsidi dapat dilakukan secara non tunai antara petani dan petugas kios. Selain itu, melalui penggunaan kartu tani ini, informasi mengenai harga pupuk subsidi, kuota pupuk subsidi yang diberikan kepada petani sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan saldo yang terdapat pada kartu tani petani dapat dengan mudah diketahui.

Dalam konteks beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi petani dalam penggunaan kartu tani, yang mengakibatkan pelaksanaannya belum optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah masih dapat digunakannya (KTP) sebagai prasyarat dalam transaksi pembelian pupuk subsidi, sementara beberapa petani juga menghadapi kesulitan dan kurang pemahaman terkait penggunaan kartu tani, yang menyebabkan beberapa petani masih enggan untuk mengurus kartu tani ke Bank Mandiri. Selain

itu, minimnya motivasi petani dalam menerapkan penggunaan kartu tani juga menjadi kendala utama yang mengakibatkan terhambatnya penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi.

Pemerintah berupaya mengatasi kelangkaan pupuk melalui program kartu tani dengan harapan bahwa petani akan merespons positif dengan menerapkan program tersebut. Tingginya respons petani terhadap program kartu tani akan mendukung terlaksananya program pemerintah, khususnya dalam upaya mengantisipasi kelangkaan pupuk subsidi. Penelitian ini diawali dengan distribusi kartu tani sejak tahun 2018 yang meskipun telah dilakukan, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara teknis. Peneliti bertujuan untuk menyelidiki respons petani terhadap kartu tani, khususnya sejauh mana keinginan mereka untuk melaksanakan program sesuai dengan manfaat dan tujuan yang terkandung dalam kartu tani. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami respons petani terhadap kartu tani setelah distribusi, dengan fokus mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penerimaan dan implementasinya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman mendalam terkait dinamika respons petani terhadap kartu tani serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Respons petani dipengaruhi oleh faktor-faktor, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respons petani terhadap program kartu tani. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons petani terhadap pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi respons petani terhadap pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis respons petani terhadap pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi respons petani terhadap pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan sarana mengembangkan kemampuan akademik serta menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah
- b. Bagi pemerintah dan instansi yang terkait diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- c. Bagi petani, dapat memberikan pengetahuan mengenai kartu tani, sehingga diharapkan petani dapat melaksanakan program tersebut dengan baik dan berkelanjutan.

